

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG

William Cunrad Tobe

NPP. 29.1339

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.1339@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Program Statement/ Background (GAP): Regional autonomy is the provision of independence for autonomous regions in order to provide good services for the community. **Purpose:** This study aims to analyze the Regional Original Revenue Growth Capability of the Kupang City Government for the 2019-2021 fiscal year, the inhibiting factors for increasing PAD capacity, as well as efforts to increase Regional Original Revenue Growth. **Method:** Qualitative research method with descriptive approach and data collection with descriptive inductive method. This study uses the theory of financial ratio analysis by Mahmudi, which consists of the ratio of regional income variance, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial independence and the ratio of regional revenue growth. **Result:** The ability to grow local revenue from 2019 to 2021 at the Regional Asset Finance Agency of Kupang City is still not good. Regional income variance in 2019-2021 with an average of 92.6% is on a good scale. The percentage of the degree of decentralization of Kupang City for 3 fiscal years is at a percentage of 14.2% with the ratio of the degree of decentralization being on an interval scale of Less Good. The ratio of the level of financial independence in 2019-2021 with an average of 19.8% is on a very low scale. **Conclusion:** The percentage of the regional financial growth rate of Kupang City tends to decrease with an average percentage of -3.22% where on the interval scale it is not good and there are inhibiting factors in its implementation, namely Human Resource Competence Problems, Lack of supervision, Lack of awareness of the taxpayer community. Suggestions for local government researchers can improve human resources, increase supervision and increase awareness of taxpayers so that Regional Autonomy can run well.

Keywords : *Analysis ratio, Growth of Regional Original Income (PAD), Regional Autonomy*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian bagi daerah-daerah otonomi agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemampuan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2019-2021, faktor penghambat peningkatan kemampuan PAD, serta upaya untuk meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. **Metode:** penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data dengan metode deskriptif induktif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yaitu terdiri dari rasio Varians Pendapatan Daerah, Rasio derajat

Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. **Hasil:** Kemampuan Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2019 sampai 2021 di Kota Kupang masih belum baik. Varians pendapatan daerah pada Tahun 2019-2021 dengan rata rata sebesar 92,6% berada pada skala baik. Besar persentase derajat desentralisasi Kota Kupang selama 3 tahun anggaran berada pada persentase 14,2% dengan rasio derajat desentralisasi berada pada skala interval Kurang Baik. Rasio tingkat kemandirian keuangan pada tahun 2019-2021 dengan rata rata sebesar 19,8% berada pada skala rendah sekali. **Kesimpulan:** Persentase tingkat pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang cenderung menurun dengan rata rata persentase sebesar -3,22% dimana pada skala interval kurang baik dan ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kurangnya pengawasan, Kurangnya kesadaran Masyarakat wajib pajak. Saran peneliti pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga Otonomi Daerah Dapat Berjalan dengan baik.

Kata kunci: Analisis Rasio, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara umum pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kemandirian bagi daerah-daerah otonomi agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan sesuai dengan SOP yang berlaku serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, pengoptimalan perolehan dari potensi daerahnya serta meningkatkan akuntabilitas perekonomian daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dari penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dominan didapatkan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait perimbangan keuangan antara Pembangunan nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar Alinea IV, salah satunya tentang kesejahteraan umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan gabungan dari beberapa pos Pajak dari 4 pendapatan berikut antara lain retribusi daerah, pajak daerah, hasil hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta perusahaan milik daerah. PAD atau pendapatan asli daerah berperan signifikan menentukan kemampuan suatu daerah untuk menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta berbagai program pembangunan. Implementasi yang ada dilapangan menunjukan jika banyak daerah yang mempunyai kontribusi PAD kecil dari keseluruhan penerimaan daerah. Penerimaan pendapatan paling besar diperoleh dari pendapatan pemerintah ataupun instansi lain yang lebih tinggi, hal ini menggambarkan tingginya ketergantungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat.

1.2. KESENJANGAN MASALAH YANG DIAMBIL

Permasalahan Pendapatan Kota Kupang, Pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Tidak lebih besar dari 20% dengan capaian terbesar pada 2017 dengan capaian 19% yang kemudian pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 hanya mencapai 11% dari total pendapatan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Di sisi lain, penurunan kemampuan daerah kota kupang tidak hanya disebabkan dari faktor pemerintah daerah, tetapi juga hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh daerah bahkan dalam lingkup nasional atas dampak dari wabah pandemi covid-19. Kondisi pada saat ini, yang membatasi kegiatan masyarakat dan berakibat langsung pada perekonomian daerah pada umumnya menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengatasi dampak dari melemahnya kemampuan ekonomi daerah sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan wewenang yang diberikan sebagai daerah otonom dalam menjalankan otonomi daerah.

Pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi sulit untuk terpenuhi jika tidak didukung dengan penghasilan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kontribusi PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah.

1.3. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Emanuel Yoseph Ike Silli Lewoleren (2019) Berjudul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalambentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah lamadicanangkan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Adelia Puspa Andini (2020) yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatra Selatan

Penelitian berikutnya yaitu dari Yudha Ary Dirgantara (2015) yang berjudul Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kota Surakarta tahun 2005– 2015. Dalam penelitian ini didapati hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap PAD Kota Surakarta bila dibandingkan dengan variabel lainnya.

1.4. PERNYATAAN KEBARUAN ILMIAH

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambii judul analisis kemampuan pendapatan asli daerah (pad) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada masa pandemi covid-19 di kota kupang yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori Mahmudi (2019) mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Kupang dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.5. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui Bagaimana Kemampuan PAD saat pandemi Covid-19 di Pemerintah Daerah Kota Kupang serta untuk

mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena peneliti ingin memberikan permasalahan di lapangan secara objektif agar bisa memahami masalah-masalah yang ada terkait dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Keuangan, Kepala Sub Bidang Analisis, serta 2 orang Staff pelaksana bidang anggaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

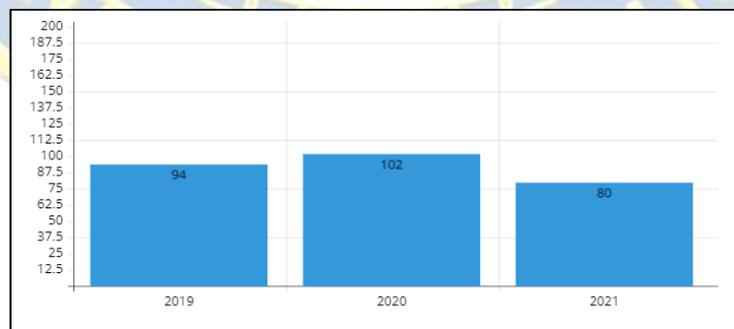
Penulis menganalisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan analisis rasio dalam mewujudkan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan Teori Mahmudi (2019) dimana dimensi yang digunakan meliputi Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) “Analisis Varians Pendapatan Daerah bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pendapatan daerah”. Sehingga Analisis varians pendapatan sangatlah sesuai dengan masalah penelitian, sehingga bisa peneliti gunakan untuk menyusun penelitian ini. Analisis dilaksanakan melalui cara mencari selisih diantara anggaran dan realisasi pendapatan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun } t}{\text{Anggaran Tahun } t} \times 100\% = \text{Analisis Varians Pendapatan}$$

Informasi mengenai selisih anggaran bisa membantu Pemerintah daerah memahami serta menganalisis kinerja pendapatan dan dapat dilihat melalui gambar berikut



Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa Varians pendapatan daerah pada Tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu secara Fluktuatif dimana pada Tahun 2020 merupakan varian pendapatan daerah dengan presentase paling besar yaitu sebesar 102,75% dan pada tahun 2021 peresentasi varians pendapatan mulai mengalami penurunan yang

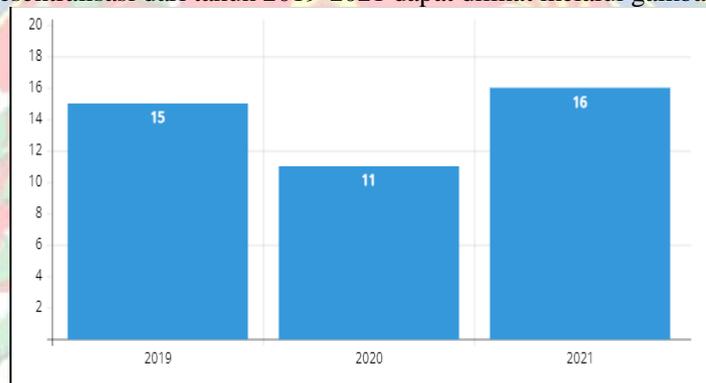
signifikan yaitu hanya sebesar 80,68%.

3.2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi adalah Perbandingan jumlah PAD dan total penerimaan daerah. Hasil yang akan didapatkan akan menunjukkan besar kecilnya kontribusi PAD pada total penerimaan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Kontribusi PAD yang semakin besar terhadap total pendapatan daerah menunjukan jika kinerja keuangan Pemda menjadi semakin baik, dan berlaku juga sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk memperoleh rasio derajat desentralisasi fiskal berdasarkan Mahmudi¹ yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi dari tahun 2019-2021 dapat dilihat melalui gambar berikut :



Gambar diatas menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kota Kupang di tahun 2019 sebesar 15% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 11% setelah itu meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,6%, Sehingga besar persentase derajat desentralisasi Kota Kupang selama 3 tahun anggaran berada pada persentase 14,2%. Jika diukur dengan skala interval yang dapat dilihat pada tabel 2.2, maka rasio derajat desentralisasi Kota Kupang berada pada skala interval Kurang Baik. Hal tersebut disebabkan oleh kontribusi PAD yang sangat kecil dan target yang ditetapkan terhadap PAD yang kecil yang menyebabkan kinerja keuangan daerah Kota Kupang masih sangat kurang dalam meningkatkan penerimaan PAD guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

3.3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana yang dari pihak eksternal pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan dengan hasil yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda terhadap dana dari pihak eksternal yang rendah. Begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat rasio kemandirian keuangan yang dihasilkan, maka itu menunjukkan bahwa semakin tingginya ketergantungan Pemda terhadap dana dari pihak eksternal pemerintah daerah.

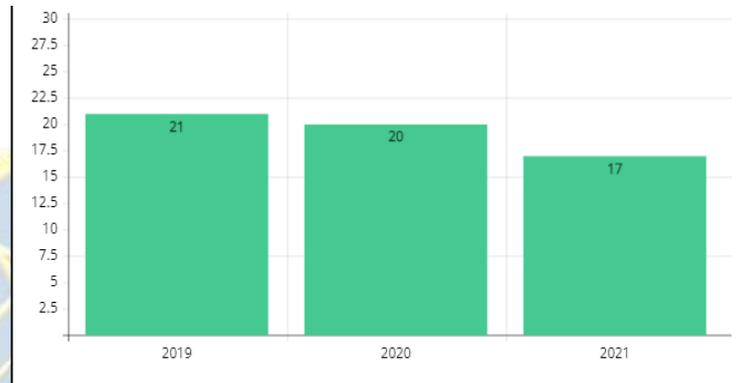
Rumus yang digunakan dalam menghitung besar kecilnya tingkat rasio kemandirian keuangan

¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2019-2021 dapat dilihat melalui gambar berikut :



Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat perkembangan keuangan daerah Kota Kupang cenderung menurun pada tiap tahun anggarannya. Penurunan yang terparah terjadi pada tahun anggaran 2020. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Kupang pada tahun 2020 berada pada persentase 20,66%, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 mendapat presentase sebesar 21,15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang pada pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki masih rendah. Untuk itu Perlu ada upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah, pajak daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan & pendapatan yang sah, Sehingga Pemda bisa diberikan kewenangan lebih dalam mengatur daerah nya masing – masing.

3.4. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

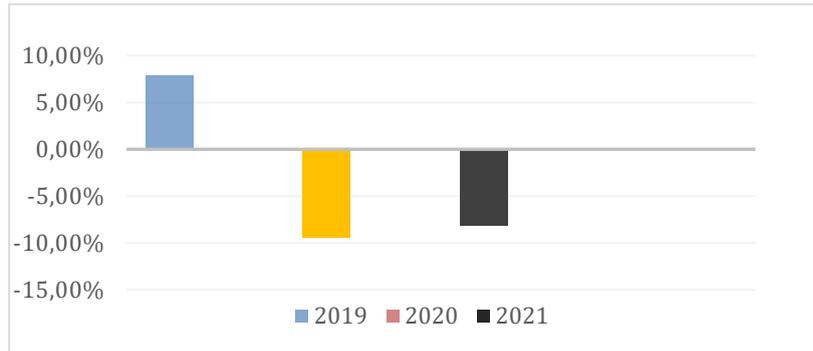
Analisis ini digunakan untuk mencari tahu kecenderungan yang penurunan ataupun peningkatan kineja dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Analisis ini sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejarah kinerja pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Pertumbuhan}}{\text{Pendapatan Th } t} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Th t : Tahun yang dihitung
Th (t - 1) : Tahun sebelumnya

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kota kupang tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang cenderung menurun pada tiap tahun anggarannya. Penurunan yang terparah terjadi pada tahun anggaran 2020. Rasio tingkat pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang pada tahun 2020 berada pada persentase -9,46%, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 mendapat presentase sebesar 7,90%.

Hasil dari perhitungan Pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang rata-rata -3,08%. Jika diukur dengan skala interval maka Kota Kupang berada pada skala 75-100, sehingga dapat diartikan bahwa rasio Pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang berada pada Pertumbuhan Pendapatan yang negatif dimana skala presentase nya dibawah 0 % artinya Kota Kupang sangat membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk memenuhi belanja kegiatan pemerintahannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang masih belum dapat memenuhi belanja pemerintahannya.

Keadaan tersebut terjadi dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tiap tahunnya mengalami kenaikan yang bersifat Fluktuatif akan tetapi masih belum mampu membiayai urusan pemerintahannya sendiri, selain itu PAD Kota Kupang masih tidak sebanding dengan pendapatan transfer, Sehingga kontribusi terbesar dalam total pendapatan adalah dari pendapatan eksternal.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menentukann masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kontribusi PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Apabila permasalahan ini tidak ditindaklanjuti maka pemerintah Kota Kupang akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah adalah penyumbang tertinggi PAD. Pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi sulit untuk terpenuhi jika tidak didukung dengan penghasilan daerah.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan bahwa besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan daerahnya sendiri untuk menentukannya dengan keluluasaan yang telah diberikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih kecil akan menimbulkan suatu anggapan yang menandakan bahwa kurangnya kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang memberikan penjelasan, rendahnya Pertumbuhan keuangan daerah Kota Kupang ini karena masih adanya oknum yang melakukan kecurangan terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Permasalahan kompetensi sumber daya manusia

Pemerintah daerah harus didorong agar bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan penerimaan daerahnya masing-masing dengan melalui peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan masyarakat agar bertambah baik. Peningkatan fasilitas publik dan perbaikan jasa layanan bisa menjadikan kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sekaligus mendorong kontribusi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Otonomi Daerah. Kompetensi sumber daya manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang belum optimal dan sekarang jabatan struktural lebih dikurangi untuk meningkatkan jabatan fungsional. Dan apabila dilihat dari pendidikan yang ada pada pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang rata-rata pendidikan belum maksimal. Sehingga tidak menutup kemungkinan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Adapun berikut ini diperoleh data SDM pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang berdasarkan pendidikan :

Tabel
Data Personil BKAD Kota Kupang Menurut Pendidikan

No	Pendidikan (PNS)	Jumlah (Orang)
1.	S2	3
2.	S1	35
3.	Sarjana Muda /DIII	3
4.	SMA	7
	Jumlah Total	48

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa masih rata-rata pendidikan terakhir yang dimiliki adalah DIV/SI dimana jika dalam pelaksanaan pengelolaan dari segi kualitas masih dikatakan belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang maksimal. Kesiapan sumber daya manusia baik dalam kuantitas dan kualitas. Dalam pemahaman sumber daya manusia terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting di lapangan harus dapat member penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat berupa kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan bagi aparat yang mempunyai potensial untuk mengetahui operasional dinas pelayanan pajak sehingga pada saat pelatihan aparat tersebut akan lebih mudah untuk memahami apa yang diperlukan untuk memnuhi harapan peningkatan pendapatana asli daerah.

2. Pengawasan kurang maksimal

Berkaitan dengan upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah dapat mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan. Dalam merelaisasikan penerimaan terhadap target Pendapatan yang telah ditetapkan, akan diupayakan semaksimal mungkin terhadap pajak daerah dan retribusi, dengan menggali potenssi wajib pajak baru, mengoptimalkan pengawasan di lapangan dlama pelaksanaan pemungutan”.

Dapat disimpulkan bahwa meningkatkan pengawasan diperlukan upaya untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki daerah Kota Kupang.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar pajak , retribusi dan pungutan lainnya

Kesadaran masyarakat didasarkan pada obyek yang dilakukan oleh pelayan pajak apabila adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara terpadu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan pelayan pajak melakuakn penyuluhan secara terpadu dan memberikan mekanisme dan prosedur pembayaran pajak dan memberikan informasi nominal denda yang diitetapkan bagi pelanggar wajib pajak.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran di dalam pembayaran pajak, masyarakat masih mengalami kesulitan karena kurangnya informasi yang tersedia reseption. Kendala pembayaran ini didorong dengan sanksi yang diterapkan pada masyarakat belum adanya kejelasan. Besarnya denda yang ditetapkan kurang tepat dengan besarnya nominalnya yang ditetapkan. Dengan adanya kendala pemungutan pajak pada masyarakat membuat Pendapatan Asli Daerah tidak optimal untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan otonomi daerah

IV. KESIMPULAN

Kemampuan Pendapatan Asli Daerah saat Pandemi Covid-19 dari tahun 2019 sampai 2021 di BKAD Kota Kupang masih belum baik karena ada kendala yang disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan Kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang di BKAD Kota Kupang adalah Permasalahan kompetensi sumber daya manusia; Kurangnya pengawasan; Kesadaran masyarakat yang kuraang dalam membayar pajak & retribusi. Dari beberapa kendala pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah mempersiapkan upaya untuk mengatasi permasalahan. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah: Untuk meningkatkan sumber daya manusia; Meningkatkan pengawasan yang kurang maksimal; Meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi badan/perorangan yang tidak tertib membayar pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Cresswell. J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Kumar, Ranjit. 2016. *Research Methodology*. Yogyakarta: Erlangga.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Basics of social research qualitative and Quantitative Approaches*. Second.
- Sinurat, Marja. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
- Hamdi, Muchlis, and Siti Ismaryati. "Filosofi Penelitian." *Metodologi Penelitian Administrasi*(2014):138.
<http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 13, 2021.
<https://kbbi.web.id/analisis>.
- Kisman Lantang. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. *Ekomen*, 18(2), 20–29.
<https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/332>
- Pendekatan Penelitian*. (2020, October 29). JOPGlass.
<https://www.jopglass.com/pendekatan-penelitian>
- Portal data*. (2021). Kemenkeu.go.id. Diakses Selasa, 24 Agustus 2021
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3, 43–59.